

Lampiran Surat Keputusan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata

Nomor : 0637/B6.5/SK/KP/2020

Tanggal : 7 Februari 2020

**ROLE MODEL  
DI LINGKUNGAN PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

| No  | Nama                                | Jabatan  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 1.  | Sabli, SH, MH                       | Kepala Pusat                                   |
| 2.  | Nana Halim, SE, MM                  | Kepala Bagian Umum                             |
| 3.  | Drs. Edy Rismunandar, MM.           | Kepala Bidang Fastingkom                       |
| 4.  | Drs. Iwan Wirawan, MM.              | Kepala Bidang Program dan Informasi            |
| 5.  | Dr. Akhirudin, SH., S.Pd., M.Pd.    | Kepala Seksi Penyelenggaraan                   |
| 6.  | Sarah Annisa, S.E.                  | Kepala Seksi Evaluasi                          |
| 7.  | Dr. Nining Dwirosanti, S.Psi., M.Si | Kepala Seksi Program                           |
| 8.  | Zulfikar, ST, M.KKK                 | Kepala Seksi Data dan Informasi                |
| 9.  | Harun Al Rosyid, M.Kom              | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga  |
| 10. | Cucu Surahman, S.Sos, S.ST, M.Ed    | Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian |
| 11. | Wilia Ningsih, S.E., M.Pd           | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran |
| 12. | Nanang Rukmana, SE. Ak, M.Si.       | Ketua Departemen Akuntansi                     |
| 13. | Dr. Ir. Danik Dania Asadayanti, MP  | Ketua Departemen Boga                          |
| 14. | Sri Prihati, S.Pd                   | Ketua Departemen Busana                        |
| 15. | Pipih Siti Sofiah, S.Pd, M.Pd       | Ketua Departemen Kecantikan                    |
| 16. | Nelfuad, S.Sos                      | Ketua Departemen Pekerjaan Sosial              |
| 17. | Rr. Indah Setyowati, MM             | Ketua Departemen Pemasaran                     |
| 18. | Drs. Sutanto, MM                    | Ketua Departemen Perhotelan                    |
| 19. | M. Tasyhar, S.Pd                    | Ketua Departemen Perkantoran                   |
| 20. | Dra. Dwi Hastuti, MM                | Ketua Departemen Teknologi Pendidikan          |
| 21. | Gita Mahardika Pamuji, S.ST.Par     | Ketua Departemen Usaha Perjalanan Wisata       |

Kepala,  
  
Sabli, S.H, M.H  
NIP. 196405021993031002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 - Jawa Barat  
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252  
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535

E-mail : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id ; Website : www.p4tkbispar.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : ~~0637~~/B6.5/SK/KP/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN ROLE MODEL  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
(WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

**DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA**

**KEPALA PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  - b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan Role Model Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU :** Role Model Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.
- Menetapkan pimpinan sebagai role model di PPPPTK Bisnis dan Pariwisata.

- KEDUA : Kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan dapat berperan sebagai role model bagi setiap individu lain dalam organisasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Depok,

Februari 2020

Kepala,

Sabri, SH, MH

NIP. 196405021993031002 ↴